

## ANALISIS BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAMBI TAHUN 2009-2014

Mila Permata Sari

Program Studi Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Di Propinsi Jambi Tahun 2009-2014”. Di bawah bimbingan Dr. H. Syaparuddin. SE.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlembangan belanja tidak langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2014. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi belanja tidak langsung dari sisi Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2009-2014. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif, Analisis Alokasi Belanja terhadap perkembangan belanja tidak langsung, Analisis kinerja belanja dari sisi efisiensi. Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi tahun 2009-2014 berdasarkan Rata-rata per tahun yakni tertinggi pada kabupaten Bungo sebesar 1.19% dan terendah pada kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0.11 %. Berdasarkan efisiensi belanja tidak langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi pada tahun 2009-2014 dari rata-rata belanja tidak langsung target dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan karena dari tahun 2009-2014 seluruh kabupaten sudah efisien dari tahun ke tahun dalam mengelola belanja tidak langsung Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi pada Kota Sungai Penuh sudah sangat efektif dari Efisiensi Belanja Tidak Langsung.

**Kata Kunci :** Tingkat Perkembangan, Efisiensi Belanja Tidak Langsung.

### Abstract

This research is titled "Analysis of Indirect Expenditures of Regencies/Municipalities in Jambi Province for the Years 2009–2014", under the supervision of Dr. H. Syaparuddin, SE., M.Si. The aim of this study is to examine and analyze the development of indirect expenditures of regencies/municipalities in Jambi Province from 2009 to 2014. Additionally, it seeks to analyze the efficiency of indirect expenditures from the perspective of efficiency levels across regencies/municipalities in Jambi Province during the same period. The analytical techniques used include both qualitative and quantitative analysis, allocation analysis related to the development of indirect expenditures, and expenditure performance analysis from an efficiency standpoint. The development of indirect expenditures in regencies/municipalities of Jambi Province during 2009–2014, based on average yearly growth, shows that the highest growth occurred in Bungo Regency at 1.19%, while the lowest was in Tanjung Jabung Timur Regency at 0.11%. In terms of the efficiency of indirect expenditures during 2009–2014, the average indirect expenditure targets showed consistent improvement year by year. All regencies demonstrated increasing efficiency in managing indirect expenditures over the period, with Sungai Penuh City being noted as highly effective in terms of indirect expenditure efficiency.

**Keywords:** Growth Rate, Indirect Expenditure Efficiency

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan pada segala bidang, dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air

diupayakan dapat di manfaatkan oleh masyarakat .dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara global. Dalam pelaksanaan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri sejahtera, maju dan kukuh moral dan etika yang ditujukan untuk memperbaiki taraf kesejahteraan secara luas.

Perkembangan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan kehidupan sosial politik, ekonomi yang demokratis berkeadilan. Bertitik tolak terhadap fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh dan penyelenggaraan negara yang sangat birokrat dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan menyebarkan terjadinya krisis moneter dan ekonomi. Dengan demikian hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya krisis moral yang memperhatikan dan timbulnya krisis nasional yang berkelanjutan

Belanja daerah dalam penyusunan anggaran sewajarnya berorientasi kepada publik besarnya alokasi anggaran yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat .Pengalokasian anggaran yang lebih mengutamakan kepada kepentingan masyarakat akan tergambar dalam proporsi pengalokasian anggaran

yang lebih besar pada biaya pelayanan yang dapat dinikmati antara pemerintah daerah dan SKPD merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan untuk mewujudkan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab akan kepentingan rakyat pemerintah daerah atau DPRD harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik ,yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus di gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*)

,pertumbuhan ekonomi (*pro-job*)serta menjaga kelestarian dan berkelanjutan lingkungan (*pro-environment*).

Mulai tahun 2010 struktur belanja di pilah dan di belanjakan atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagai mana di atur dalam peraturan menteri dalam negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah .menurut Nurlan (2009) belanja daerah ,meliputi semua pengeluaran dari kas rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah .belanja belanja daerah di rinci menurut urusan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang di wujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya sesuatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Rintonga (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak

memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah dalam APBD kabupaten/kota di propinsi Jambi meliputi belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan pendekatan analisis deskriptif dengan metode pengelompokan data secara kualitatif untuk menganalisis dan membandingkan alokasi belanja daerah. Penelitian ini merumuskan diri pada pengajian mengenai analisis alokasi anggaran belanja pelayanan publik.

### **Jenis Dan Sumber Data Jenis Data**

Jenis data dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber internal maupun eksternal. data internal ada;ah data yang berasal dari organisasi di mana penelitian dilakukan, yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota propinsi Jambi. Sedangkan data eksternal adalah data yang berasal dari badan pusat statistik (BPS) kabupaten kota propinsi Jambi.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota propinsi Jambi dan juga menggunakan data yang bersumber dari supe literatur dan penelitian- penelitian yang dilakukan sebelumnya serta studi pustaka.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data ,peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode yaitu:

- a. Studi kepustakaan, di gunakan untuk meneliti mengkaji berbagai bahan dokumentasi yang berkaitan dengan judul, topik, dan pendekatan peneliti tentang desentralisasi fiskal dan alokasi anggaran belanja tidak langsung juga mendapatkan pijakan berupa dasar peraturan dan kebijakan yang relevan ,serta arah teorinya dari peneliti-peneliti sebelumnya .
- b. Dokumentasi, digunakan untuk menelusuri data-data dokumen belanja pelayanan publik dan penganggaran ,terutama yang terkait dengan pokok penelitian ,yang di peroleh dari berbagai instansi.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat perkembangan APBD dan alokasi belanja pelayanan publik di kabupaten/kota propinsi Jambi tahun anggaran 2010-2014

Adapun alat analisis yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini :

- a. Untuk menghitung perkembangan anggaran dan belanja tidak langsung(Halim 2010) dapat menggunakan rumus:

$$R = \frac{BTL\ n - BTL\ n - 1}{BTL\ n - 1} \times 100$$

Ket:

R = Perkembangan

Btl t = Tahun sekarang

Btl t-1 = Btl tahun sebelumnya

b. Untuk menjawab tujuan yang ke dua yaitu efisiensi belanja dan belanja tidak langsung terhadap APBD daerah menggunakan rumus Mahmudi Kriteria Efisiensi menurut pemendagri No.690.900-327 yang di kutip Yulia Anggaran Sari (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Lebih dari 100% = sangat efisien
- b. 90% - 100% = Efisiensi
- c. 80%-90% = cukup efektif
- d. 60%-80% = kurang efisien
- e. Kurang dari sama dengan 60% = tidak efisien

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Apabila dilihat secara geografis kondisi wilayah kabupaten/kota memiliki sumber dan potensi yang cukup besar untuk menunjukkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai mana yang telah di tentukan dalam undang-undang No.32 2004 tentang pemerintah daerah yang telah di atur sebagai jenis penerimaan daerah yang terhimpun dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah tertutup.

Penganggaran belanja tidak langsung sebagai mana di atur pada pasal 97 ayat (2) peraturan menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD), sehingga pada SKPD lainnya dalam RKA SKPD untuk belanja tidak langsung ,hanya menganggarkan belanja pegawai.

**Tabel 1. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Batang Hari**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	184.207	-3897
2011	363.468	91.07
2012	351.968	3.26
2013	451.604	24.2
2014	499.278	10.55
<b>Rata-rata</b>		<b>450.55</b>

Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Berdasarkan tabel di atas 1 Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten batang hari pada tahun 2009-2010 pemerintah Kabupaten Batang hari kontribusi belanja tidak langsung pada tahun 2010 perkembangan belanja tidak langsung sebesar -38.91 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 91,07% bahkan persentase tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar 3.26 % dan pada tahun selanjutnya juga mengalami penurunan seperti tahun 2013 jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar 24.2% dan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 10.55 % rata-rata persentase dari tahun 2009-2014 sebesar 450.55% .

**Tabel 2. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bungo**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	184.207	37,87
2011	395.329	114.61
2012	435.377	10.13
2013	539.160	23.83
2014	588.988	9.24
<b>Rata-rata</b>		<b>39.136</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Berdasarkan tabel 2 Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Bungo pada tahun 2010 sebesar 37.87% pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 114.61% pada tahun 2012 persentase belanja kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar 10.13% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 23.83% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 9.24% dari perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Bungo mengalami peningkatan penurunan dan peningkatan yang tidak terlalu jauh dan rata-rata dari tahun 2009-2014 sebesar 39.136%.

**Tabel 3. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kerinci**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	184.207	46,18
2011	352.022	91.10
2012	334.652	4.93
2013	394.656	15.63
2014	399.263	1.16
<b>Rata-rata</b>		<b>31.8</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Berdasarkan tabel 3 perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Kerinci pada tahun 2009-2014 persentase perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Kerinci tahun 2010 sebesar 46.18% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 91.10% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4.93% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 15.63% dan pada tahun 2014 perkembangan belanja tidak langsung kembali mengalami penurunan sebesar 1.16% dan rata-rata dari tahun 2009-2014 sebesar 31.8%.

**Tabel 4. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Merangin**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	322.259	16.74
2011	313.933	2.58
2012	386.649	23.16

2013	447.625	15.77
2014	547.465	22.30
<b>Rata-rata</b>		<b>16.044</b>

Sumber : statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Berdasarkan tabel 4 perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Merangin tahun anggaran 2009-2014 perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Merangin pada tahun 2010 sebesar 16.74% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2.58% dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 23.16% pada tahun 2013 persentase perkembangan belanja mengalami penurunan sebesar 15.77% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 22.30% dan rata-rata perkembangan tahun 2009-2014 sebesar 14.044%.

**Tabel 5. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Muaro Jambi**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	329.819	19.03
2011	397.764	20.60
2012	365.044	-8.22
2013	412.536	13.00
2014	490.845	18.98
<b>Rata-rata</b>		<b>53.49</b>

Sumber : statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Berdasarkan tabel 5 perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Muaro Jambi tahun 2009-2014 persentase belanja tidak langsung tahun 2010 sebesar 19.03% pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 20.60% dan pada tahun 2012 perkembangan belanja mengalami penurunan sebesar -8.22% dan pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 13.00% dan pada tahun 2014 persentase perkembangan belanja mengalami peningkatan sebesar 18.98% dan rata-rata persentase belanja tidak langsung sebesar 53.49%

**Tabel 6. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sarolangun**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	273.825	28.50
2011	315.171	15.10
2012	323.883	-2.76
2013	367.233	13.38
2014	413.322	12.55
<b>Rata-rata</b>		<b>13.354</b>

Sumber : statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Berdasarkan tabel 6 Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Sarolangun tahun 2009-2014 pada tahun 2010 perkembangan belanja tidak langsung sebesar 28.50% pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 15.10% pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar -2.76% dan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 13.38% dan tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 12.55% dan rata-rata perkembangan belanja tidak langsung sebesar 2009-2014 sebesar 13.354%.

**Tabel 7. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	299.771	12.73
2011	348.117	16.12
2012	372.959	7.13
2013	402.214	8.93
2014	499.379	24.15
<b>Rata-rata</b>		<b>13.812</b>

Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Dari tabel 7 perkembangan belanja tidak langsung kabupaten tanjung Jabung barat perkembangan belanja tidak langsung tahun 2010 sebesar 12.73% perkembangan belanja tidak langsung tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 16.12 % dan pada tahun 2012 menurun sebesar 7.13 % dan tahun 2013 persentase belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 8.93% dan pada tahun 2014 perkembangan belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 24.15 % dan rata- rata perkembangan belanja tidak langsung sebesar 13.812%.

**Tabel 8.Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	269.258	33.26
2011	277.042	2.89
2012	305.433	10.24
2013	322.880	5.40
2014	341.809	5.86
<b>Rata-rata</b>		<b>51.85</b>

Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Berdasarkan tabel 8 perkembangan belanja tidak langsung kabupaten tanjung Jabung timur pada tahun 2010 sebesar 33.26 % dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2.89 % dan pada tahun 2012 kembali meningkat yakni sebesar 10.24 % dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5.40% dan tahun2014 mengalami penurunan sebesar 5.40 % dan rata – rata perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni sebesar 51.85%.

**Tabel 9. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tebo**

Tahun	Anggaran	Perkembangan(%)
2010	210.472	13.69
2011	267.974	27.25
2012	294.921	10.05
2013	341.223	15.69
2014	362.148	6.13
<b>Rata-rata</b>		<b>14.562</b>

Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Berdasarkan tabel 9 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tebo tahun 2009-2014 perkembangan belanja tahun 2010 sebesar 13.69 % dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 27.25% saat tahun 2012 persentase perkembangan mengalami penurunan sebesar 10.05% dan juga pada tahun 2013 juga mengalami

penurunan sebesar 15.63% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan 6.13% yakni sebesar 0.06% dan rata-rata perkembangan belanja tidak langsung kabupaten Tebo sebesar 14.562%.

**Tabel 10. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Jambi**

Tahun	Anggaran	Perkembangan(%)
2010	433.262	16.25
2011	489.881	13.06
2012	534.561	9.12
2013	638.773	16.31
2014	676.597	5.92
<b>Rata-rata</b>		<b>12.132</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Berdasarkan tabel 10 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Jambi Tahun 2009-2014 perkembangan belanja tidak langsung kota Jambi pada tahun 2010 sebesar 13.25% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yakni sebesar 13.06 % pada tahun 2012 persentase belanja tidak langsung sebesar 9.12% mengalami penurunan dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 16.31% dan pada tahun 2014 perkembangan mengalami penurunan kembali sebesar 5.92 % dan rata – rata perkembangan belanja tidak langsung kota Jambi sebesar 12.132%.

**Tabel 11. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Sungai Penuh**

Tahun	Anggaran	Perkembangan (%)
2010	184.207	165.76
2011	219.598	19.21
2012	229.977	4.72
2013	264.044	12.90
2014	291.621	10.44
<b>Rata-rata</b>		<b>42.606</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Berdasarkan tabel 11. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Sungai Penuh Tahun 2009-2014 perkembangan belanja tidak langsung tahun 2010 sebesar 165.76% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan yakni sebesar 19.21% dan juga pada tahun 2012 juga mengalami penurunan yang sangat rendah yakni sebesar 4,72% dan pada tahun 2013 perkembangan belanja tidak langsung sebesar 12.90% dan pada tahun 2014 persentase mengalami penurunan sebesar 10.44% dan rata-rata perkembangan kota sungai penuh tahun 2009-2014 sebesar 42.606%.

#### **Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi 2009-2014**

**Tabel 12. Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Batang Hari**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	301.883	301823	99,980	Efisiensi
2010	184.207	184187	99,989	Efisiensi
2011	351.968	351948	99,994	Efisiensi
2012	363.468	363448	99,994	Efisiensi
2013	451.604	451584	99,995	Efisiensi
2014	499.278	499258	99,995	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99,93</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Berdasarkan tabel di atas Efisiensi belanja tidak langsung kabupaten Batang Hari pencapaiannya target realisasi sudah mengalami Efisiensi dari tahun 2009-2014 dan rata-rata sebesar 99.93% dan pada tahun 2009 capaian sebesar 99.980% pada tahun 2010 sebesar 99,989% pencapaian target realisasi dan pada tahun 2011 sebesar 99,994% dan pada tahun 2012 juga sudah Efisiensi karena mengalami kesamaan pada tahun 2013 yakni sebesar 99.994 % dan pada tahun 2013 dan 2014 Efisiensi belanja tidak langsung kabupaten Batang Hari sebesar 99.995%.

**Tabel 13. Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bungo**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	296.515	296495	99,999	Efisiensi
2010	184.329	184309	99,989	Efisiensi
2011	395.160	395140	99,994	Efisiensi
2012	435.377	435357	99,995	Efisiensi
2013	539.160	539140	99,996	Efisiensi
2014	588.988	588968	99,996	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.94</b>	<b>Efisien</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2014*

Realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Bungo realisasi target belanja tidak langsung tahun 2009-2014 target belanja tidak langsung sudah mengalami efisien dari tahun ke tahun seperti tahun 2009 target realisasi pada tahun ini sebesar 99.999% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 99.989% setiap tahun mengalami perubahan setiap pencapaian target pada tahun 2011 sebesar 99.994% dan pada tahun berikutnya sebesar 99.996% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013-2014 realisasi belanja tidak langsung mengalami pencapaiannya target yang sama yaitu sebesar 99.996% dan rata pencapaiannya efisiensinya sebesar 99.94%.

**Tabel 14. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kerinci**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	342,292	342272	94,16	Efisiensi
2010	184.207	184187	99,989	Efisiensi
2011	352.022	352002	99,994	Efisiensi
2012	334.652	334632	99,994	Efisiensi
2013	394.656	394.636	99,994	Efisiensi
2014	399.263	399.243	99,994	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.94</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Berdasarkan tabel di atas Efisien Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kerinci pencapaiannya target realisasi sudah mengalami Efisien dari Tahun 2009- 2014 dan rata-rata sebesar 99,16% dan pada tahun 2009 capaian sebesar 99.980% pada tahun 2010 sebesar 99.989% pencapaian target realisasi dan pada tahun 2011 sebesar 99,994% dan pada tahun 2012 juga sudah Efisien karena mengalami kesamaan pada tahun 2013 yakni sebesar 99.994% dan pada tahun 2013 dan 2014 Efisien belanja tidak langsung kabupaten batang hari sebesar 99.994%.

**Tabel 14. Efisien Belanja Tidak Langsung Kabupaten Merangin**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	276,029	276009	99.754	Efisiensi
2010	322.259	322239	99,993	Efisiensi
2011	313.933	313923	99,996	Efisiensi
2012	386.649	386629	99.827	Efisiensi
2013	447.625	447605	99,995	Efisiensi
2014	547.465	547445	99,996	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99,96</b>	<b>Efisiensi</b>

Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Efisien belanja tidak langsung kabupaten Merangin pencapaiannya target realisasinya pada tahun 2009-2014 setiap tahunnya mengalami perubahan dan pada tahun 2009 efisien belanja tidak langsung kabupaten batang hari sebesar 99.754% pada tahun 2010 sudah efisien juga dengan anggaran sebesar 99,993% dan pada tahun 2011 sebesar 99.996% pada tahun 2012 sudah efisien juga yakni sebesar 94.827% dan pada tahun 2013 efisien sebesar 99.995% dan begitu juga pada tahun 2014 efisiennya sudah efisien juga yakni sebesar 99.996% dan rata- rata per tahun dari tahun 2009-2014 yakni sebesar 99.96 %.

**Tabel 15. Efisien Belanja Tidak Langsung Kabupaten Muaro Jambi**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	277.071	277051	99,992	Efisiensi
2010	329.819	329799	99,993	Efisiensi
2011	397.764	397761	99,999	Efisiensi
2012	365.044	365024	99,994	Efisiensi
2013	412.536	412516	99,995	Efisiensi
2014	490.845	490825	99,995	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99,994</b>	<b>Efisiensi</b>

Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Muaro Jambi realisasi target belanja tidak langsung tahun 2009-2014 target belanja tidak langsung sudah mengalami EFISIEN dari tahun ke tahun seperti tahun 2009 target realisasi pada tahun ini sebesar 99.992% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 99.999 % setiap tahun mengalami perubahan setiap pencapaian target pada tahun 2011 sebesar 99.993% dan pada tahun berikutnya sebesar 99.995% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013-2014 realisasi belanja tidak langsung mengalami pencapaiannya target yang sama yaitu sebesar 99.995% dan rata pencapaiannya Efisien nya sebesar 99.994 %.

**Tabel 16. Efisien Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sarolangun**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	213.088	213068	99,990	Efisiensi
2010	273.825	273805	99,992	Efisiensi
2011	315.171	315151	99,993	Efisiensi
2012	323.883	323863	99,993	Efisiensi

2013	367.233	367213	99,994	Efisiensi
2014	413.322	413302	99,995	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.993</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Efisien Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sarolangun pada tahun 2009-2014 Efisien target realisasi belanja dari tahun ke tahun sudah mengalami efisien dan dapat kita lihat dari tahun ke tahun yakni seperti tahun 2009 Efisien nya sudah mengalami efisien yakni sebesar 99.990 % dan tahun 2010 sudah efisien juga yakni sebesar 99.992 % dan pada tahun 2011-2012 pencapaiannya efisiensinya sama besar yaitu sebesar 99.993 % pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak begitu mengalami perubahan yakni 99.994 % dan 99.995 % dan rata-rata efisiensinya sebesar 99.993 % dari tahun ke tahun.

**Tabel 17. Efisien Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	265.899	265870	99,989	Efisiensi
2010	299.771	299751	99,993	Efisiensi
2011	348.117	348097	99.254	Efisiensi
2012	372.959	372939	99.637	Efisiensi
2013	402.214	402194	99,995	Efisiensi
2014	499.379	499359	99,995	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.995</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur pencapaiannya target realisasinya pada tahun 2009-2014 setiap tahunnya mengalami perubahan dan pada tahun 2009 efisiensi belanja tidak langsung kabupaten batang hari sebesar 99.989 % pada tahun 2010 sudah efisien juga dengan anggaran sebesar 99,993 % dan pada tahun 2011 sudah sangat efisien sebesar 99.254 % pada tahun 2012 efisiensinya sudah efisien juga yakni sebesar 99.637% dan pada tahun 2013-2014 efisiensi mengalami kesamaan yakni sebesar 99.995 dan rata-rata per tahun dari tahun 2009-2014 yakni sebesar 99.995% .

**Tabel 18. Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	202.041	202021	99,990	Efisiensi
2010	269.258	269238	99,992	Efisiensi
2011	277.042	277022	99,992	Efisiensi
2012	305.433	305413	99,993	Efisiensi
2013	322.880	322860	99,993	Efisiensi
2014	341.809	341798	99.994	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.993</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Realisasi Target Belanja Tidak Langsung tahun 2009-2014 target pencapaian belanja tidak langsung sudah mengalami efisien dari tahun ke tahun seperti tahun 2009 target realisasi pada tahun ini sebesar 99.990% dan mengalami penurunan pada tahun 2010-2011 mengalami kesamaan jumlah efisiensi yakni sebesar 99.992 % dan begitu juga pada tahun 2012 -2013 juga ada kesamaan dalam efisiensinya yakni sudah efisien yaitu sebesar

99.993 % dan pada tahun 2014 jumlah efisiensinya sebesar 99.994% dan rata-rata efisiensinya sudah mengalami efisien yakni sebesar 99.993 %.

**Tabel 19. Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tebo**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	185.121	187101	98,941	Efisiensi
2010	210.472	210452	99,990	Efisiensi
2011	267.974	267954	99,536	Efisiensi
2012	294.921	294901	99,993	Efisiensi
2013	341.223	341203	99,994	Efisiensi
2014	362.148	362128	99,477	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.819</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tebo pencapaiannya target realisasinya pada tahun 2009-2014 setiap tahunnya mengalami perubahan dan pada tahun 2009 efisiensi belanja tidak langsung kabupaten batang hari sebesar 99.941% pada tahun 2010 sudah efisien juga dengan anggaran sebesar 99,990 % dan pada tahun 2011 sudah sangat efisien sebesar 99.535 % pada tahun 2012 efisiensinya sudah efisien juga yakni sebesar 99.993 % dan pada tahun 2013 sebesar 99.995 pada tahun 2014 sudah efisien juga yaitu sebesar 99.477% dan rata- rata per tahun dari tahun 2009-2014 yakni sebesar 99.819%.

**Tabel 20. Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	381.497	381477	99,994	Efisiensi
2010	433.262	433242	99,995	Efisiensi
2011	489.881	489861	99,995	Efisiensi
2012	534.561	534541	99,996	Efisiensi
2013	638.773	638763	99,998	Efisiensi
2014	676.597	676577	99,997	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.995</b>	<b>Efisiensi</b>

*Sumber :statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013*

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi realisasi target Belanja Tidak Langsung tahun 2009-2014 target belanja tidak langsung sudah mengalami efisien dari tahun ke tahun seperti tahun 2009 target realisasi pada tahun ini sebesar 99.994% dan mengalami penurunan pada tahun 2010-2011 mengalami kesamaan jumlah efisiensi yakni sebesar 99.995 % dan pada tahun 2012 yaitu sebesar 99.996 % dan 2013 efisiensinya yakni sudah efisien yaitu sebesar 99.998 % dan pada tahun 2014 jumlah efisiensinya sebesar 99.997 % dan rata-rata efisiensinya sudah mengalami efisien yakni sebesar 99.995 %.

**Tabel 21. Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kota Sungai Penuh**

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Efisiensi
2009	69.312	69292	99,144	Efisiensi
2010	184.207	184187	99,148	Efisiensi
2011	219.598	219578	99,990	Efisiensi

2012	229.977	229957	99.991	Efisiensi
2013	264.044	264024	99.425	Efisiensi
2014	219.621	219601	99.89	Efisiensi
<b>Rata-rata</b>			<b>99.589</b>	<b>Efisiensi</b>

Sumber : statistik keuangan daerah provinsi Jambi 2013

Efisiensi Belanja Tidak Langsung Kota Sungai Penuh Tahun 2009-2014 dari tahun ke tahun sudah mengalami efisiensi dan malah dari target realisasi belanja tidak langsung efisiensinya bisa di bilang sudah sangat efisien dari kabupaten/kota di provinsi yang lain dapat kita lihat pada tahun 2009 sebesar 99.144 % dan tahun 2010 sebesar 99.148 % selanjutnya pada tahun 2011 sebesar 99.990% terlihat juga pada tahun 2012 yakni sebesar 99.991% dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 99.89 % dan tahun 2014 sebesar 99.425 % dan rata -rata efisiensi dari tahun 2009-2014 kota sungai penuh yaitu sebesar 99.98 %.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi tahun 2009-2014 berdasarkan Rata-rata per tahun yakni tertinggi pada kabupaten Bungo sebesar 1.19% dan terendah pada kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0.11 %.
2. Berdasarkan efisiensi belanja tidak langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi pada tahun 2009-2014 dari rata-rata belanja tidak langsung target dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan karena dari tahun 2009- 2014 seluruh kabupaten sudah efisien dari tahun ke tahun dalam mengelola belanja tidak langsung Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi pada Kota Sungai Penuh sudah sangat efektif dari Efisiensi Belanja Tidak Langsung .

##### Saran

Peneliti berikut dapat menambahkan periode waktu yang di gunakan yang lebih lengkap. Bagi pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jambi khususnya pos belanja daerah agar lebih selektif lagi dalam mengeluarkan kas untuk belanja agar dapat tercipta efektif dan efisien di lingkungan pemerintah Kabupaten/kota di propinsi Jambi.

Untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan belanja tidak langsung sebaiknya pemerintah harus menetapkan standar ukuran atau patokan dalam mengambil kebijakan pembangunan agar terciptanya keseimbangan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Novia, 2011. *Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Di Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik (2014) *Provinsi Jambi dalam angka*.
- Darise, Nurlan, 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Derise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan 1. Edisi Kedua. PT Indeks. Kembangan-Jakarta Barat.
- G.James dan M.Jhon , 2009. *Prinsip-Prinsip manajemen keuangan*, Edisi 13 buku 1, PT.Salemba empat. Jalan raya lentang agung NO.101-jakarta selatan.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Seri Bunga Rampai, Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.

- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Indriani, Hylina, 2011. *Analisis Belanja Daerah Kabupaten Ngawi*.
- Jusmawati, 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. PT Gelora Aksara Pratama : Yogyakarta.
- Nofriza, Eri, 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2010*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi Kampus Sarolangun.
- Patilima hamid, 2013, *metode penelitian kualitatif*. Alfaberta, cv jl geherkalong hilit bandung.
- Renyowijoyo, Muindro, 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*. Edisi ke 2. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Ritonga, 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Suparmoko.M, 2003, *keuangan negara dalam teori dan praktek*. BPFE.yogyakarta
- Statistik keuangan daerah Provinsi Jambi 2013. [http.://jambi.bps.go.id](http://jambi.bps.go.id)
- Tanjung A, 2009. *Penata Usahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Republik Indonesia.
- Widjaja Haw, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Widjaja, Haw, 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riza Yulita,(2013), *analisis komponen belanja daerah terhadap total belanja daerah, yulita riza kabupaten merangin tahun 2007-2011 skripsi*. Jurusan keuangan daerah. Fakultas ekonomi dan bisnis. Iniversitas jambi kampus sarolangun.